

**PENDAMPINGAN PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI DESA SUMBERTEBU KABUPATEN MOJOKERTO****Fiki Hurin Baridah¹, Isa Anshori²**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya^{1,2}e-mail: fikihurinn@gmail.com

Diterima: 25/12/2025; Direvisi: 31/12/2025; Diterbitkan: 7/01/2026

ABSTRAK

Dana Desa merupakan instrumen strategi pemerintah dalam mendorong pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa secara berkelanjutan. Namun dalam pelaksanaannya, pemanfaatan Dana Desa masih menghadapi berbagai kendala, terutama keterbatasan kapasitas aparatur desa dan belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mendampingi pemerintah dan masyarakat Desa Sumbertebu, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, dalam pengelolaan Dana Desa agar lebih partisipatif, akuntabel, dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Metode pelaksanaan kegiatan meliputi identifikasi permasalahan bersama mitra, perencanaan program secara partisipatif, pelaksanaan pendampingan, serta pemantauan dan evaluasi. Pendampingan difokuskan pada penguatan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan administrasi Dana Desa, optimalisasi peran BUMDes sebagai penggerak ekonomi lokal, serta peningkatan pemahaman masyarakat terhadap program pembangunan desa. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman aparatur desa terhadap prinsip tata kelola Dana Desa, penguatan fungsi BUMDes, serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan pemberdayaan. Kegiatan ini memberikan kontribusi pada penguatan tata kelola Dana Desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Sumbertebu secara berkelanjutan.

Kata Kunci: *Dana Desa, Pemberdayaan Masyarakat, Pengabdian Masyarakat***ABSTRACT**

Village Funds are a strategic government instrument to promote rural development and community empowerment in a sustainable manner. However, their implementation often faces challenges, particularly limited administrative capacity of village officials and suboptimal community participation in planning and program implementation. This community service activity aimed to assist the government and community of Sumbertebu Village, Bangsal District, Mojokerto Regency, in managing Village Funds in a more participatory, accountable, and empowerment-oriented manner. The methods applied included joint problem identification with community partners, participatory program planning, implementation of mentoring activities, as well as monitoring and evaluation. The mentoring focused on strengthening the capacity of village officials in Village Fund administration, optimizing the role of the village-owned enterprise (BUMDes) as a driver of the local economy, and enhancing community understanding of village development programs. The results indicate an improvement in village officials' understanding of Village Fund governance principles, strengthened functions of BUMDes in supporting local economic activities, and increased community participation in development and empowerment initiatives. Overall, this community service activity contributes

to improved Village Fund governance and the sustainable enhancement of community welfare in Sumbertebu Village.

Keywords: *Village Funds, Community Empowerment, Community Service*

PENDAHULUAN

Dana Desa merupakan kebijakan nasional yang dirancang untuk memperkuat kapasitas pemerintahan desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan dan pemberdayaan berbasis potensi lokal. Kebijakan ini menempatkan desa sebagai subjek pembangunan dengan memberikan kewenangan dan sumber daya fiskal yang lebih besar untuk mengelola kebutuhan dan prioritasnya sendiri. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa Dana Desa berpotensi mendorong pembangunan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat jika dikelola secara partisipatif dan akuntabel (Sutiyo & Maharjan, 2017; Lewis, 2018). Namun demikian, efektivitas Dana Desa sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia aparatur desa dalam menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan (OECD, 2019).

Dalam praktiknya, pemanfaatan Dana Desa masih menghadapi berbagai tantangan, terutama keterbatasan kapasitas aparatur desa, rendahnya pemahaman administrasi dan tata kelola keuangan, serta belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa lemahnya kapasitas administrasi dan tata kelola di tingkat lokal dapat menghambat efektivitas penggunaan dana publik, termasuk Dana Desa (Andrews et al., 2017; Lewis, 2017). Selain itu, pembangunan desa yang belum sepenuhnya melibatkan masyarakat berpotensi menghasilkan program yang kurang berkelanjutan dan tidak sepenuhnya menjawab kebutuhan riil warga desa (Mansuri & Rao, 2018). Oleh karena itu, penguatan kapasitas aparatur dan peningkatan partisipasi masyarakat menjadi aspek penting dalam pengelolaan Dana Desa.

Desa Sumbertebu, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, merupakan salah satu desa penerima Dana Desa yang telah mengalokasikan anggaran untuk berbagai sektor strategi, seperti pengembangan ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), peningkatan layanan kesehatan, ketahanan pangan, serta pembangunan infrastruktur dasar. Upaya ini menunjukkan komitmen pemerintah desa dalam memanfaatkan Dana Desa untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Namun hasil observasi awal menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Sumbertebu masih menghadapi kendala pada aspek perencanaan, administrasi, serta keterlibatan kelompok masyarakat secara inklusif, khususnya perempuan dan pemuda. Kondisi ini sejalan dengan temuan Grillos dan Herrmann (2021) yang menyatakan bahwa keterbatasan kapasitas kelembagaan dan rendahnya inklusivitas partisipasi masyarakat masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan desa berbasis desentralisasi.

Berdasarkan kondisi tersebut, tim pengabdian dari perguruan tinggi memandang perlu dilaksanakan kegiatan pendampingan pengelolaan Dana Desa sebagai upaya penguatan kapasitas aparatur desa dan pemberdayaan masyarakat. Pendampingan dipandang sebagai strategi pendekatan yang tidak hanya mentransfer pengetahuan teknis, tetapi juga mendorong perubahan praktik tata kelola dan peningkatan kesadaran kolektif masyarakat desa (Mardikanto & Soebiato, 2019). Melalui kegiatan pengabdian ini, diharapkan pemerintah desa dan masyarakat Desa Sumbertebu mampu mengoptimalkan pemanfaatan Dana Desa secara lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan, sehingga Dana Desa benar-benar berfungsi sebagai instrumen pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pendampingan dilaksanakan secara bertahap, yang diawali dengan kegiatan sosialisasi inti di Aula Kantor Bupati Mojokerto dengan melibatkan unsur pemerintah daerah, pemerintah desa, dan perwakilan masyarakat sebagai bagian dari penguatan sinergi pembangunan desa. Tahap selanjutnya berupa pendampingan teknis dilaksanakan di Desa Sumbertebu, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, dengan mitra utama pemerintah desa, pengelola BUMDes GGS Jaya, kader kesehatan, serta perwakilan masyarakat dari setiap dusun. Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ini adalah pendekatan partisipatif dan pendampingan, yang menempatkan mitra sebagai subjek aktif dalam seluruh tahapan kegiatan. Pendekatan ini dipilih untuk memastikan bahwa program yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat dan potensi lokal desa, serta mendorong peningkatan kapasitas dan kelanjutan program di tingkat desa.

1. Identifikasi Masalah

Tahap identifikasi masalah dilakukan sebagai langkah awal untuk memperoleh gambaran kondisi aktual pengelolaan Dana Desa di Desa Sumbertebu. Proses ini dilaksanakan melalui diskusi awal dan wawancara dengan aparat desa, pengelola BUMDes, kader kesehatan, serta perwakilan masyarakat. Identifikasinya dibatasi pada kendala-kendala yang dihadapi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan Dana Desa, termasuk keterbatasan kapasitas administrasi dan partisipasi masyarakat. Hasil identifikasi masalah ini menjadi dasar dalam menyusun kebutuhan pendampingan dan arah kegiatan pengabdian yang akan dilaksanakan.

2. Perencanaan Kegiatan

Tahap perencanaan kegiatan dilakukan secara partisipatif bersama mitra melalui forum musyawarah desa. Pada tahap ini, tim pengabdian dan mitra bersama-sama menyusun rencana pendampingan yang disesuaikan dengan hasil identifikasi masalah dan potensi lokal desa. Perencanaan mencakup penentuan jenis kegiatan, sasaran pendampingan, serta jadwal pelaksanaan kegiatan. Melalui perencanaan bersama, program pendampingan yang diharapkan dapat diterima, didukung, dan dilaksanakan secara optimal oleh semua pihak yang terlibat.

3. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pendampingan dilakukan sesuai dengan rencana yang telah disepakati bersama mitra. Kegiatan pendampingan meliputi pendampingan administrasi pengelolaan Dana Desa, penguatan peran BUMDes dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta edukasi terkait pengembangan usaha dan kewirausahaan desa. Selain itu, kegiatan ini juga mencakup fasilitasi program kesehatan dan sosial, seperti pendampingan kegiatan Posbindu PTM dan edukasi penanganan stunting. Selama pelaksanaan kegiatan, tim bertugas berperan sebagai fasilitator yang mendampingi mitra dalam memahami dan menerapkan praktik pengelolaan Dana Desa yang lebih efektif dan akuntabel.

4. Pemantauan dan Evaluasi

Tahap pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk menilai ketercapaian tujuan kegiatan serta efektivitas pelaksanaan pendampingan. Evaluasi difokuskan pada perubahan pemahaman aparatur desa, tingkat partisipasi masyarakat, serta dampak kegiatan terhadap pengelolaan Dana Desa. Pemantauan dilakukan melalui observasi langsung, diskusi reflektif dengan mitra, dan peninjauan terhadap dokumen pendukung kegiatan. Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan perbaikan dan rekomendasi untuk keinginan kegiatan pendampingan pada periode selanjutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pelaksanaan kegiatan pendampingan pengelolaan Dana Desa di Desa Sumbertebu dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi dan pendampingan yang melibatkan pemerintah desa, pengelola BUMDes, kader kesehatan, serta perwakilan masyarakat dari setiap dusun. Kegiatan sosialisasi dihadiri oleh aparatur desa, perwakilan kepala dusun (kadus), unsur BPD, pengelola BUMDes GGS Jaya, kader posyandu dan Posbindu, serta perwakilan masyarakat dari masing-masing dusun. Secara keseluruhan, kegiatan ini diikuti oleh lebih dari 30 peserta yang mewakili unsur pemerintahan desa dan masyarakat.

Kegiatan sosialisasi difokuskan pada pemahaman pengelolaan Dana Desa, prinsip akuntabilitas, serta peran masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program desa. Peserta menunjukkan antusiasme yang cukup tinggi, terlihat dari partisipasi aktif dalam diskusi dan sesi tanya jawab terkait perencanaan, pelaporan, serta pemanfaatan Dana Desa. Dokumentasi kegiatan sosialisasi pendampingan pengelolaan Dana Desa disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Kegiatan Sosialisasi Pendampingan Pengelolaan Dana Desa

Selain kegiatan sosialisasi, pendampingan juga dilakukan pada aspek pemberdayaan ekonomi desa melalui pemeliharaan BUMDes GGS Jaya. Pendampingan ini melibatkan pengelola BUMDes dan perangkat desa dalam pengelolaan unit usaha desa, seperti pujasera,

taman bermain, dan fasilitas rekreasi desa. Hasil pendampingan menunjukkan bahwa unit usaha BUMDes dapat dikelola secara lebih tertata dan dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan desa serta sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat. Visualisasi fasilitas ekonomi desa hasil pemanfaatan Dana Desa melalui BUMDes GGS Jaya disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Fasilitas GGS Desa Sumbertebu Hasil Pemanfaatan Dana Desa

Dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan, tim pengabdian mendukung penguatan program kesehatan dan sosial yang didanai melalui Dana Desa, khususnya pada kegiatan penanganan stunting dan Posbindu PTM Rajawali. Pendampingan dilakukan melalui fasilitasi edukasi gizi dan penguatan peran kader posyandu dalam penyampaian informasi kesehatan kepada masyarakat. Kegiatan ini mendorong meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pola hidup sehat dan upaya pencegahan penyakit tidak menular. Pada aspek ketahanan pangan, pendampingan difokuskan pada penguatan pemahaman aparatur desa dan masyarakat mengenai alokasi Dana Desa untuk sektor pertanian dan peternakan, sesuai ketentuan minimal 20%. Pendampingan mencakup fasilitasi diskusi terkait pemanfaatan Dana Desa untuk pembangunan jalan usaha tani, bantuan bibit, serta pelatihan petani.

Selain itu, tim pengabdian juga mendukung perencanaan pembangunan sarana air bersih dan sanitasi sebagai bagian dari mitigasi risiko kekeringan yang berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat. Di bidang perlindungan sosial, kegiatan pendampingan mencakup fasilitasi pemahaman mekanisme penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa kepada keluarga miskin dan rentan. Pendampingan ini membantu aparatur desa dalam menyesuaikan alokasi anggaran sesuai ketentuan yang berlaku, meskipun dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala administratif yang berdampak pada keterlambatan penyaluran.

Pendampingan juga diarahkan pada peningkatan kapasitas aparatur desa melalui kegiatan penguatan administrasi dan pengelolaan keuangan desa, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui fasilitasi pelatihan keterampilan. Selain itu, pendampingan mendukung pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar desa, seperti jalan desa, irigasi, dan penerangan jalan umum. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengabdian terwujud melalui musyawarah desa dan keterlibatan dalam pelaksanaan kegiatan, meskipun partisipasi perempuan dan pemuda masih perlu ditingkatkan. Dampak hasil pendampingan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat Desa Sumbertebu dirangkum pada Tabel 1.

Tabel 1. Dampak Pelaksanaan Pendampingan Pengelolaan Dana Desa di Desa Sumbertebu

Aspek	Dampak yang Teramat
Ekonomi	Penguatan peran BUMDes dan peluang kerja lokal
Kesehatan	Peningkatan pemahaman dan akses layanan kesehatan
Ketahanan pangan	Penguatan dukungan produksi pertanian
Sosial	Perlindungan keluarga rentan melalui BLT
Infrastruktur	Peningkatan aksesibilitas dan kenyamanan lingkungan
Partisipasi	Keterlibatan warga dalam musyawarah desa
Inklusivitas	Partisipasi perempuan dan pemuda belum optimal

Pembahasan

Berdasarkan hasil kegiatan pendampingan yang telah dilaksanakan, pemanfaatan Dana Desa di Desa Sumbertebu menunjukkan kesesuaian dengan tujuan kebijakan utama Dana Desa, yaitu mendorong pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Pendampingan pada sektor ekonomi, khususnya melalui pemeliharaan pengelolaan BUMDes GGS Jaya dengan berbagai unit usaha, menunjukkan bahwa Dana Desa dapat berfungsi sebagai instrumen strategi dalam meningkatkan kemandirian ekonomi desa apabila dikelola berdasarkan potensi lokal. Temuan kegiatan ini sejalan dengan pandangan Arifin dkk. (2020) yang menyatakan bahwa Dana Desa berkontribusi terhadap penguatan ekonomi perdesaan dan penciptaan lapangan kerja melalui kegiatan produktif berbasis potensi lokal. Penguatan institusi lokal dan pengelolaan sumber daya berbasis potensi wilayah berperan penting dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan (Kyriacou & Roca-Sagalés, 2017).

Pada sektor kesehatan dan sosial, hasil pendampingan menunjukkan bahwa pemanfaatan Dana Desa tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pendampingan terhadap program penanganan stunting dan kegiatan Posbindu PTM mendorong peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya kesehatan, gizi, dan upaya pencegahan penyakit. Kondisi ini mendukung pandangan Firmansyah dkk. (2020) yang menekankan bahwa pendekatan promotif dan preventif dalam pelayanan kesehatan berperan efektif dalam meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pendampingan berkontribusi pada penguatan peran Dana Desa dalam mendukung pembangunan kesehatan berbasis komunitas.

Hasil kegiatan pendampingan pada sektor ketahanan pangan menunjukkan bahwa alokasi Dana Desa untuk pembangunan jalan usaha tani, bantuan bibit, dan pelatihan petani memperkuat kapasitas produksi masyarakat desa yang sebagian besar bergantung pada sektor pertanian dan peternakan. Pendampingan ini membantu aparatur desa dan masyarakat memahami peran Dana Desa sebagai pengungkit sektor ekonomi primer. Temuan ini sejalan dengan Asher dan Novosad (2020) yang menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur pedesaan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan produktivitas pertanian dan

kesejahteraan rumah tangga perdesaan. Selain itu, pendampingan terhadap penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa menegaskan fungsi Dana Desa sebagai instrumen perlindungan sosial, meskipun masih ditemui kendala administratif dalam pelaksanaannya, sebagaimana diungkapkan oleh Hanna dan Olken (2018) terkait keterbatasan kapasitas administrasi dalam efektivitas program sosial.

Dari aspek tata kelola, kegiatan pendampingan berkontribusi pada peningkatan kapasitas aparatur desa melalui penguatan pemahaman administrasi dan pengelolaan keuangan desa serta penerapan prinsip transparansi penggunaan Dana Desa. Praktik ini mencerminkan upaya menuju pengelolaan Dana Desa yang lebih akuntabel. Namun demikian, hasil pendampingan juga menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia aparatur desa masih menjadi tantangan dalam perencanaan dan pelaporan keuangan. Hal ini sejalan dengan Lewis (2017) yang menyatakan bahwa keterbatasan kapasitas administrasi di tingkat pemerintahan lokal menjadi faktor utama penghambat efektivitas pengelolaan keuangan publik, serta diperkuat oleh Andrews dkk. (2017) yang menyoroti lemahnya kapasitas institusional sebagai penyebab rendahnya kualitas perencanaan dan akuntabilitas anggaran.

Partisipasi masyarakat yang teridentifikasi melalui musyawarah desa dalam kegiatan pendampingan menunjukkan adanya keterlibatan warga dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program Dana Desa. Partisipasi ini berkontribusi terhadap legitimasi dan keinginan program pembangunan desa. Namun demikian, keterlibatan kelompok perempuan dan pemuda masih belum optimal, sehingga diperlukan pendekatan pendampingan yang lebih inklusif agar manfaat Dana Desa dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Secara keseluruhan, hasil kegiatan pengabdian ini menegaskan bahwa Dana Desa di Desa Sumbertebu berfungsi sebagai instrumen transformasi sosial dan ekonomi di tingkat lokal, sebagaimana ditegaskan oleh Grillos dan Herrmann (2021) serta Faguet dan Pöschl (2018) bahwa efektivitas pembangunan berbasis desentralisasi memerlukan penguatan kelembagaan lokal, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan partisipasi masyarakat yang aktif.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pendampingan pengelolaan Dana Desa di Desa Sumbertebu, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, telah memberikan kontribusi positif terhadap penguatan tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat. Pendekatan partisipatif yang diterapkan dalam kegiatan ini mendorong peningkatan pemahaman aparatur desa terkait pengelolaan Dana Desa yang lebih akuntabel dan transparan, serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program desa. Pendampingan yang dilakukan juga berkontribusi pada penguatan peran BUMDes sebagai penggerak ekonomi lokal, peningkatan pemahaman terhadap program kesehatan masyarakat dan ketahanan pangan, serta dukungan terhadap perlindungan sosial bagi kelompok rentan. Meskipun demikian, hasil kegiatan menunjukkan bahwa partisipasi kelompok perempuan dan pemuda masih perlu ditingkatkan melalui pendekatan pendampingan yang lebih inklusif. Oleh karena itu, mengundang kegiatan pendampingan dan penguatan kapasitas kelembagaan desa menjadi penting agar pemanfaatan Dana Desa dapat memberikan dampak yang lebih merata dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat Desa Sumbertebu.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrews, M., Pritchett, L., & Woolcock, M. (2017). Membangun Kemampuan Negara: Bukti, Analisis, Tindakan. *World Development*, 99, 1–15. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2017.05.011>
- Arifin, B., Wicaksono, E., & Sari, Dr (2020). Dana Desa, Pembangunan Pedesaan, Dan Penciptaan Lapangan Kerja Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 35(2), 123–138. <https://jurnal.ugm.ac.id/jieb/article/view/54768>
- Arifin, B., Wicaksono, E., Tenrini, Rh, Wardhana, Iw, Setiawan, H., Damayanti, A., Solikin, A., Suhendra, M., & Ariutama, Ga (2020). Dana Desa, Badan Usaha Milik Desa, Dan Ketenagakerjaan: Bukti Dari Indonesia . *Jurnal Studi Pedesaan* , 79, 382–394. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2020.08.052>
- Asher, S., & Novosad, P. (2020). Jalan Pedesaan Dan Pembangunan Ekonomi Lokal. *American Economic Review*, 110(3), 797–823. <https://doi.org/10.1257/aer.20180268>
- Beaglehole, R., Bonita, R., Horton, R., Adams, C., Alleyne, G., Asaria, P., ... Watt, J. (2017). *Priority Actions For The Non-Communicable Disease Crisis*. The Lancet, 377(9775), 1438–1447. [https://doi.org/10.1016/s0140-6736\(11\)60393-0](https://doi.org/10.1016/s0140-6736(11)60393-0)
- Faguet, Jp, & Pöschl, C. (2018). Apakah Desentralisasi Baik Untuk Pembangunan? Perspektif Dari Akademisi Dan Pembuat Kebijakan. *Journal Of Economic Perspectives* , 32(4), 3–26. <https://doi.org/10.1257/jep.32.4.3>
- Firmansyah, D., Susetyo, D. P., & Sumira, M. (2020). Dampak Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Pada Desa Cibitung Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi. *S E*, 3(2).
- Grillos, T., & Herrmann, P. (2021). Penguatan Kelembagaan Di Tingkat Lokal: Bukti Dari Program Pembangunan Terdesentralisasi. *World Development*, 142, 105445. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2021.105445>
- Hanna, R., & Olken, Ba (2018). Pendapatan Dasar Universal Versus Transfer Terarah: Program Anti-Kemiskinan Di Negara Berkembang. *Journal Of Economic Perspectives* , 32(4), 201–226. <https://doi.org/10.1257/jep.32.4.201>
- Kyriacou, Ap, & Roca-Sagalés, O. (2017). Dampak Desentralisasi Terhadap Pembangunan: Bukti Dari Negara-Negara Oecd. *World Development*, 93, 339–357. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2016.11.006>
- Lewis, Bd (2017). Pengeluaran Pemerintah Daerah Dan Penyampaian Layanan Di Indonesia: Dampak Buruk Dari Transfer Sumber Daya Fiskal Yang Besar. *Studi Regional* , 51(11), 1695–1707. <https://doi.org/10.1080/00343404.2016.1216957>
- Lewis, Bd (2018). Desentralisasi Desa, Akuntabilitas, Dan Pembangunan Lokal Di Indonesia. *Jurnal Studi Pedesaan* , 59, 164–178. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2018.02.005>
- Mansuri, G., & Rao, V. (2018). *Localizing Development: Does Participation Work?* World Bank Publications. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29114>

Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Pedesaan: Pendekatan Partisipatif . *Jurnal Pembangunan Pedesaan* , 38(2), 245–260. <https://doi.org/10.22004/ag.econ.301345>

Martínez-Bravo, M., Padró I Miquel, G., Qian, N., & Yao, Y. (2019). The Effects Of Democracy On Public Goods And Redistribution: Evidence From Indonesia. *Journal Of Public Economics*, 169, 162–176. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2019.01.005>

Nagler, P., & Naudé, W. (2017). *Non-Farm Entrepreneurship In Rural Sub-Saharan Africa: New Empirical Evidence*. *World Development*, 96, 199–213. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2016.09.004>

OECD. (2019). Making Decentralisation Work: A Handbook For Policy-Makers. *Oecd Publishing*. <https://doi.org/10.1787/g2g9faa7-en>

Sutiyo, & Maharjan, K1 (2017). Desentralisasi Dan Pembangunan Pedesaan Di Indonesia. *Pegas Singapura*. <https://doi.org/10.1007/978-981-10-3208-0>